

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Program Kartu Tanda Penduduk elektronik dalam penerapan identitas berbasis *single identity number* di Kabupaten Lampung Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi ketercapaian target dan sasaran program kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih belum tercapai , karena Ketidakjelasan informasi penerbitan KTP elektronik dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, rendahnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Ketidaktercapaian ini juga dapat dilihat dari jumlah total penduduk wajib KTP di di Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 632.997 hanya 536.915 yang baru melakukan perekaman sedangkan jumlah KTP elektronik fisik yang diterima masyarakat hanya berjumlah 513.403.
2. Dari segi mekanisme pelaksanaan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara belum dijalankan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan-

permasalahan seperti sosialisasi yang dijalankan belum sesuai dengan peraturan, pendistribusian perangkat yang tidak serentak karena kekurangan teknisi, perangkat jaringan komunikasi data yang masih sering mengalami gangguan, dan pemberian bimbingan teknis yang terbatas membuat pelaksanaan program ktp elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih belum berjalan secara baik dan lancar .

3. Dari segi sumber daya manusia dalam penerapan program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara masih kurang memadai, salah satu faktor yang berperan penting dalam program ini adalah Petugas operator perekam KTP elektronik tidak semuanya berlatar belakang pendidikan komputer yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Sehingga ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan tugasnya dapat menjadi penyebab kurang berhasilnya program KTP elektronik yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
4. Dalam penerapan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara hanya dianggarkan untuk pembiayaan insentif operator dan biaya sosialisasi program KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan perangkat KTP elektronik masih belum ada anggaran khusus yang dikeluarkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi kebijakan layanan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Lampung Utara, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara sebaiknya bisa lebih meningkatkan koordinasi dan memberikan sosialisasi KTP elektronik terhadap instansi terkait yakni pemerintah pusat dan Kecamatan-kecamatan yang ada di Lampung Utara serta lembaga-lembaga seperti lembaga kesehatan, perbankan, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara dan memiliki keterkaitan dengan adanya KTP elektronik agar lebih bersinergi dan bekerja sama dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP elektronik.
2. Pemerintah sebaiknya merevisi Standar Operasional Prosedur dalam Program KTP elektronik dalam hal pemberian wewenang penerbitan KTP elektronik dengan cara memberikan hak akses cetak KTP elektronik kepada pemerintah daerah setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi keabsahan data masyarakat yang akan melakukan penerbitan KTP elektronik. agar masyarakat dapat merasakan kecepatan pelayanan pada program KTP elektronik di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Utara
3. Mengingat pentingnya jaringan komunikasi data yang berkualitas baik dalam penerapan program KTP elektronik maka pemerintah hendaknya

mempertimbangkan dalam hal pemilihan provider jaringan komunikasi data sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

4. Bagi tenaga operator petugas pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Lampung Utara perlu diberikan pelatihan dalam hal perawatan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat KTP elektronik agar meminimisir terjadinya kerusakan yang dapat mengakibatkan terkendalanya proses perekaman KTP elektronik.
5. Sebaiknya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan perangkat keras dan lunak KTP elektronik agar alat yang rusak bisa cepat diperbaiki dan dapat berfungsi dengan baik lagi.